



FRAKSI PAN

Soal SILPA Rp1,1 Triliun

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Barat memberikan sikap sendiri terkait masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp1,1 Triliun dari APBD tahun 2019. "SILPA jangan dianggap sebagai momok menakutkan dalam di APBD. Sesungguhnya SILPA adalah bentuk kehati-hatian dalam menyusun APBD," kata Dr. Ardiansyah, Ketua Fraksi PAN Kalimantan Barat, Rabu (8/1) di Pontianak.

Menurut Ardiansyah, biasanya yang menjadikan APBD SILPA disebabkan banyak hal. Fraksi PAN berpendapat bentuk kehati-hatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program juga rentan terjadi SILPA. Kemudian regulasi bertentangan ketika anggaran sudah disusun juga bisa menjadi SILPA.

Makanya, lanjut dia, APBD 2019 tidak bisa dikatakan bahwa SILPA senilai Rp1,1 triliun sebagai penjabaran buruknya kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar. "Tidak bisa itu. Terlalu dini. Sebab ada lembaga auditor berwenang dalam menilai LHP APBD. Itu adalah BPK-RI wilayah Kalbar. Tunggulah audit BPK seperti apa nantinya. Dan perlu diingat audit juga bersifat dan berdasarkan temuan," ujar politisi dapil Kota Pontianak ini. Ardiansyah yang menyelesaikan program Doctor S-3 di Universitas Trisakti ini menambahkan bahwa SILPA bukanlah merupakan temuan. Nah, seandainya dipaksakan tidak menjadi SILPA APBD 2019, tetapi justru menjadi temuan BPK dan berpotensi hukum, mana yang lebih baik dipilih. "Jelas memilih SILPA dong," katanya. Dana SILPA 2019 sesungguhnya bisa dipakai dan disusun kembali untuk APBD tahun 2020. Makanya, jangan terlalu mudah menyebutkan bahwa SILPA berpotensi menjadi Disclaimer oleh BPK RI. Mata anggaran disusun benar berbasis kinerja sehingga diperoleh output dan hasilnya bagi masyarakat. *(den)*